

## ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA: STUDI KASUS PENGUATAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA (2013–2021)

Patricia Onasis Theda<sup>1)</sup>, Elyzabeth Bonethe Nasution<sup>2)\*</sup>, Qanszelir G.B. Panjdaitan XIV<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Alumni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

<sup>2)</sup>Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

<sup>3)</sup>Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: patriciaonasis88@gmail.com<sup>1)</sup>, elyzabeth.nasution@uph.edu<sup>2)\*</sup>, qanszelir.pandjaitan@uph.edu<sup>3)</sup>

### ABSTRAK

Australia dan Indonesia memiliki hubungan yang dipenuhi dengan gejolak. Salah satu kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia adalah bantuan dalam upaya penguatan ketahanan pangan Indonesia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA). Hal ini tergolong unik, mengingat Australia biasanya mendukung ketahanan pangan secara global atau secara khusus ke negara di Benua Oceania dan negara-negara terbelakang. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah faktor-faktor yang memengaruhi Australia dalam menjalankan program tersebut dan dampak penerapan program terhadap upaya penguatan ketahanan pangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif; metode eksplanasi, studi kasus, dan deskriptif; serta teknik analisis naratif dan ilustratif. Data yang digunakan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran daring. Kemudian, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Konstruktivisme dengan konsep identitas dan aksi, *logic of appropriateness*, kepentingan nasional, dan kebijakan luar negeri. Penelitian ini berfokus pada penjabaran terhadap identitas Australia serta orientasi kebijakan luar negerinya terhadap negara yang dianggapnya penting seperti Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program AIP-PRISMA didorong oleh faktor identitas dan kepentingan nasional Australia. Program AIP-PRISMA sendiri berhasil memperkuat ketahanan pangan Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Penerapan program tersebut pada akhirnya membantu Australia dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Kata Kunci: Australia, Indonesia, Kebijakan Luar Negeri, Ketahanan Pangan

### ABSTRACT

*Australia and Indonesia have a turbulent relationship. One of Australia's foreign policies towards Indonesia is assistance in efforts to strengthen Indonesia's food security through the Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA) program. This is indeed unique, considering that Australia usually supports food security globally or specifically to countries on the continent of Oceania and underdeveloped countries. This research is conducted to examine the factors that influenced Australia in implementing the program and the impact the program gives as an effort to strengthen Indonesia's food security. This research uses a qualitative approach; explanatory, case study, and descriptive methods; and narrative and illustrative analytical techniques. The data used is collected through literature studies and online searches. The research employs Constructivism theory, with the concept of identity and action, the logic of appropriateness, national interest, and foreign policy. This research focuses on the elaboration of Australia's identity and its foreign policy orientation towards a country it considers important, such as Indonesia. The results of the research show that the implementation of the AIP-PRISMA program is driven by Australian identity and national interests. The AIP-PRISMA program itself has succeeded in strengthening Indonesia's food security, especially in Eastern Indonesia. Subsequently, the implementation of the program in turn helped Australia achieve its national interests.*

*Keywords: Australia, Indonesia, Foreign Policy, Food Security*

## 1. Pendahuluan

Australia memiliki serangkaian kebijakan luar negeri yang memandu aktivitasnya di kancah global. Kebijakan tersebut mencerminkan nilai Australia serta membantunya dalam mendorong tujuan politik dan ekonominya di arena global. Salah satu kebijakan luar negeri Australia ditujukan untuk tetangga terbesarnya, Indonesia. Walaupun Australia dan Indonesia berada dalam benua yang berbeda, Indonesia merupakan negara Asia kedua yang letaknya terdekat dengan Australia setelah Timor Leste. Indonesia dan Australia juga sama-sama berada dalam kawasan Indo-Pasifik (Gomapper, 2023).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sebenarnya sudah terjalin jauh sejak Indonesia baru merdeka, namun dinamika hubungan keduanya kerap mengalami gejolak dan diibaratkan sebagai *roller-coaster* (Haryono, 2017). Hal ini dikarenakan warna dari kebijakan yang dibentuk berubah-ubah sepanjang waktu, sehingga pada satu saat berdampak positif, namun terkadang berdampak negatif terhadap hubungan kedua negara.

Terlepas dari bergejolaknya hubungan antara kedua negara, Australia dan Indonesia seringkali menyebut satu sama lain sebagai “teman yang memiliki hubungan kuat.” Hal ini tentunya sangat unik mengingat fakta bahwa kedua negara tersebut sangat berbeda, bahkan dapat dikatakan bertolak belakang. Dalam hal pengklasifikasian negara, Australia sendiri merupakan negara maju, sedangkan Indonesia masih merupakan negara berkembang (Pristiandaru, 2022).

Salah satu kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia berada dalam ranah ketahanan pangan, salah satu dari ketujuh dimensi penting keamanan insani (Human Security Unit, 2009; United Nations, 1994). Ketahanan pangan adalah keadaan saat semua orang, di setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang bergizi, cukup, dan aman, yang dapat memenuhi kebutuhan dan

preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat (Clay, 2002; BPPN, 2015). Kunci utama dalam memperkuat ketahanan pangan terletak pada bidang pertanian yang mencakup tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan (Clay, 2002).

Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Lahan pertanian Indonesia yang luas dan sumber daya alamnya yang sangat melimpah seharusnya dapat menjadi modal yang cukup bagi Indonesia dalam memproduksi pangan demi memenuhi kebutuhan domestik. Akan tetapi, ketahanan pangan di Indonesia masih belum tergolong baik. Hal ini dapat terlihat dari posisi Indonesia dalam Indeks Ketahanan Pangan Global 2022, yaitu pada peringkat ke-63 dari 113 negara. Posisi Indonesia jauh berbeda dengan Australia yang menduduki posisi ke-22 (The Economist Group, 2022). Melihat keberadaan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan penduduk positif, kondisi ketahanan pangan di Indonesia perlu ditingkatkan sedini mungkin agar Indonesia tidak semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik di masa yang akan datang.

Ketidakkampuan Indonesia dalam menanggulangi permasalahan ketahanan pangan domestik dan keberadaan kerawanan pangan sebagai sebuah permasalahan global yang kompleks mendorong Australia dalam membentuk program bantuan bagi Indonesia demi memenuhi kebutuhan pangan Indonesia, yaitu Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA). Program ini tergolong unik mengingat fakta bahwa dalam mendukung ketahanan pangan, Australia lebih sering mengambil langkah yang bersifat global atau pun hanya ditujukan kepada negara-negara di benua Oseania dan negara terbelakang (DFAT, n.d.). Indonesia merupakan satu-satunya negara berkembang di Asia yang

memperoleh bantuan langsung dalam hal ketahanan pangan oleh Australia pada awal tahun 2010-an (DFAT, 2017). Dengan demikian, penulis melihat bahwa sangatlah menarik untuk membahas faktor-faktor yang memengaruhi Australia dalam membentuk program bantuan tersebut.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia dengan Australia

Secara keseluruhan, hubungan antara Australia dan Indonesia sebenarnya cukup kooperatif dan saling menguntungkan. Namun, hubungan keduanya memang diwarnai oleh beberapa peristiwa penting yang menyebabkan hubungan Indonesia dan Australia digambarkan sebagai *roller-coaster* (Troath, 2019; Nabbs, 2020). Peristiwa tersebut meliputi Konfrontasi Indonesia melawan Malaysia selama tahun 1963–1966 dan referendum 1999 yang diikuti dengan kemerdekaan Timor Leste. Fluktuasi hubungan Indonesia dan Australia yang sebagian besar disebabkan oleh jumlah perdagangan yang rendah dan pergantian presiden yang relatif tinggi dengan warna kepemimpinan yang berbeda-beda, telah menyebabkan kepercayaan antara Indonesia dan Australia sulit terbentuk. Masyarakat Indonesia dan Australia juga cenderung memiliki perspektif negatif terhadap satu sama lain. Bahkan, sebagian masyarakat Australia menganggap Indonesia sebagai ancaman militer (Roberts & Habir, 2015).

Hubungan Indonesia dan Australia yang rawan akan krisis memerlukan penyeimbang yang dapat diperoleh melalui interaksi dan komunikasi secara mendalam. Seiring dengan pertumbuhan Indonesia menjadi kekuatan regional, dinamika hubungan Indonesia dan Australia pun mengalami perubahan. Keberadaan Indonesia dan Australia sebagai negara berkekuatan menengah membuka peluang bagi keduanya untuk bekerja sama di bidang keamanan tradisional maupun nontradisional (Nabbs, 2020; Roberts & Habir, 2015).

Peran strategis Indonesia sebagai

penyangga terhadap agresi di masa depan dan hubungan positif antara Indonesia dan Australia memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keamanan Australia. Demi menjaga stabilitas keamanan kawasan dan memperkuat kerja sama di bidang keamanan, Australia dan Indonesia menandatangani Traktat Lombok pada tahun 2006 (Abdul, et. all. 2018; Roberts & Habir, 2015). Selain itu, kesadaran akan pentingnya keamanan insani oleh Indonesia dan Australia membawa mereka pada program studi kelayakan untuk mengkaji manfaat dari perjanjian perdagangan bebas bilateral pada 2007 yang berujung pada perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia pada 2012 dan penandatanganan perjanjian pada 2019.

Akan tetapi, jalur yang ditempuh dalam kerja sama tersebut tidak mulus. Kedua negara tersebut masih berfokus pada kepentingan masing-masing. Hal ini terlihat dari insiden penyadapan telepon Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya, Kristiani Herawati, dan beberapa menteri Indonesia oleh intelijen Australia, serta pengekskusan dua warga Australia oleh Indonesia atas keterlibatan mereka dalam penyelundupan narkoba pada insiden Bali Nine, terlepas dari upaya ekstensif Australia untuk menghentikan hal tersebut.

Kendati demikian, Indonesia dan Australia masih berupaya untuk membangun hubungan yang baik. Kerja sama yang dijalin justru bertindak sebagai kekuatan penyeimbang demi memastikan stabilitas dalam menghadapi berbagai peristiwa, maupun untuk benar-benar mulai bertindak secara lebih terkoordinasi dalam menghadapi masalah bersama. Pemahaman yang mendalam terkait hubungan antara Indonesia dan Australia beserta aspek-aspek penting yang melandasi maupun memengaruhi ikatan Indonesia dan Australia akan membantu penulis memahami lebih lanjut terkait landasan dan hasil program bantuan Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support

for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA) yang akan menjadi topik kajian oleh penulis.

## **2.2. Perkembangan Kebijakan Indonesia terhadap Ketahanan Pangan**

Perspektif Indonesia terhadap ketahanan pangan sedikit menyimpang dari perspektif internasional. Indonesia membingkai isu ketahanan pangan secara politis dalam rangka mencapai swasembada pangan berkelanjutan dalam skala nasional. Indonesia menjadikan produksi pangan sebagai indikator kunci kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan. Pendekatan ini terlihat jelas khususnya pada upaya ketahanan komoditas beras sejak masa pemerintahan Sukarno. Sukarno memfokuskan ketahanan pangan pada persediaan makanan rakyat dan peningkatan produksi beras dalam negeri dengan memperluas lahan pertanian. Akan tetapi, keberhasilan Sukarno tidak terlalu nyata jika dibandingkan dengan keberhasilan Suharto. Pada masa pemerintahannya, Indonesia berhasil berubah dari pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang mandiri dalam produksi beras berkat penerapan kebijakan subsidi pertanian, perdagangan proteksionis, dan pengendalian stok pangan dalam negeri (Neilson & Wright, 2017).

Gagasan bahwa Indonesia harus mandiri dalam pangan telah tertanam dalam benak masyarakat Indonesia. Selain menjadi bagian dari budaya yang tidak dapat dilepas, gagasan ini juga didorong oleh kepentingan bisnis elit yang bekerja sama dengan pemegang kekuasaan negara. Suara petani kecil yang diuntungkan baik secara ekonomi maupun politik melalui kebijakan swasembada pangan juga turut berkontribusi pada berkembangnya pemikiran tersebut (MacRae & Reuter, 2020; Hamilton-Hart, 2019).

Memasuki pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), swasembada pangan berfokus pada lima komoditas, yaitu beras, jagung, gula, kacang-kacangan, dan

daging sapi (Rozaki, 2021). Upaya dalam mencapai ketahanan pangan juga diperluas dengan dibentuknya program revitalisasi pangan yang meliputi program pengembangan agribisnis, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil bahkan menjadi sisi gelap dari pemerintahan SBY (Winarno, 2016). Kegagalan tersebut didasari oleh keberadaan kontradiksi mendasar dalam pencapaian ketahanan pangan dengan peningkatan produksi dan stabilisasi harga. Peningkatan produksi tanpa adanya efisiensi malah menyebabkan harga jual komoditas pangan meningkat (Limenta & Candra, 2017).

Pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Indonesia lebih berfokus pada pencapaian kedaulatan pangan. Jokowi melihat konsep kedaulatan pangan sebagai kemampuan negara dalam memproduksi dan memasarkan bahan pangan secara mandiri dan keberhasilan mengeksport surplus hasil pertanian. Kedaulatan pangan sendiri merupakan Nawacita pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi mempertahankan program pencapaian swasembada lima komoditas pangan strategis SBY sebagai pilar untuk memastikan terciptanya "kedaulatan." Untuk mencapai hal tersebut, Jokowi telah secara signifikan meningkatkan dukungan administrasi dan alokasi fiskal kepada Kementerian Pertanian (Neilson & Wright, 2017). Selain itu, salah satu pencapaian besar pada era Jokowi ialah Jokowi berhasil meningkatkan produksi padi dan jagung, serta komoditas pangan lain seperti cabai dan bawang merah pada masa pemerintahannya (Sulaiman, et. all, 2018).

Berdasarkan tinjauan pustaka mengenai kebijakan Indonesia terhadap ketahanan pangan, dapat dilihat bahwa program swasembada pangan selalu menjadi inti dari kebijakan pangan Indonesia. Program tersebut telah dan mungkin masih layak secara teknis, namun keberhasilannya sangat memakan biaya dan tidak menjamin berakhirnya kerawanan pangan. Temuan ini akan membantu penulis dalam memahami

keputusan dan langkah Australia maupun Indonesia dalam menjalani program bantuan AIP-PRISMA.

### 3. Metode Penelitian

Jurnal akan ditulis dengan pendekatan kualitatif. Mengingat fokus penelitian berpusat pada faktor penyebab atau adanya kehadiran hubungan kausal, maka penulis menggunakan metode penelitian eksplanasi. Penulis akan memanfaatkan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dokumen pemerintah, berita, laporan tertulis, dan lain-lain (Sugiyono, 2013).

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis naratif, sebuah metode yang berfungsi untuk menganalisis data dan alasan sebuah peristiwa terjadi (Creswell, 2013.). Teknik ini akan digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan data terkait ketahanan pangan Indonesia dan menganalisis faktor pendorong bagi Australia dalam membentuk program AIP-PRISMA. Selain itu, karena teknik analisis naratif juga mengacu pada sebuah teknik yang menampilkan secara kronologis rentetan peristiwa yang saling terkait, yang mana aktor memiliki peranan penting dalam peristiwa tersebut, maka penulis akan menggunakan teknik tersebut untuk menjelaskan proses pelaksanaan program sebagai bagian dari peristiwa yang mana Australia dan Indonesia berperan sebagai aktor.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Pembentukan Identitas Australia

#### 4.1.1 Perjalanan Sejarah Australia

Terbentuknya Australia tidak dapat terlepas dari peristiwa kedatangan pemukim kolonial Inggris pada 1788. Pada kala itu, penduduk yang menempati tanah Australia adalah bangsa Aborigin, penduduk asli Australia (Jalata, 2013). Sejak kedatangan bangsa Inggris, jumlah bangsa Aborigin kian berkurang dari 1,5 juta jiwa hingga menjadi kurang dari 100.000 jiwa pada tahun 1901 (Bultin, 1993). Berkurangnya jumlah bangsa

Aborigin diperkirakan dikarenakan mewabahnya penyakit yang dibawa oleh penduduk Eropa serta akibat terjadinya 270 pembantaian yang disebut '*frontier massacre*', sebuah sebutan untuk pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap enam orang atau lebih dalam satu operasi, selama 140 tahun (Allam & Evershed, 2019). Bangsa Aborigin menjadi kaum marginal yang terpinggirkan dan hal tersebut terbentuk dalam 100 tahun pertama kedatangan pemukim Inggris dengan dilakukannya segregasi, penelantaran, dan marginalisasi struktural pada masa kolonial (Moore, 2014).

Sejarah yang kelam ini bahkan diakui oleh pemerintah dan mendapat permintaan maaf dari Perdana Menteri ke-24 Australia, Paul Keating, pada 10 Desember 1992. Ia berkata "Kami melakukan pembunuhan. Kami mengambil anak-anak dari ibu mereka. Kami melakukan diskriminasi dan pengucilan. Itu adalah ketidaktahuan dan prasangka kami. Dan kegagalan kami untuk membayangkan bahwa hal-hal ini dapat dilakukan pada kami." Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah maupun masyarakat dihantui oleh rasa takut akan terjadinya hal serupa kepada mereka, seperti yang mereka lakukan kepada bangsa Aborigin. Perampasan ini merupakan komponen penting dalam membentuk fondasi serta identitas bagi masyarakat Australia. Pemikiran strategis mereka berada pada pengakuan akan kerentanan yang melekat pada tanah mereka sendiri, yang pada akhirnya merupakan asal muasal terbentuknya negara tersebut (Bisley, 2016).

Adanya ketakutan akan hukum karma tersebut juga terlihat dengan pembentukan beberapa kebijakan seperti *Chinese Immigration Act* pada November 1861, *Chinese Immigrants Regulation Bill* pada 1877, *Chinese Restriction and Regulation Act* pada 1888, dan *Immigration Restriction Act* pada 1889 yang kemudian membentuk *White Australia Policy* sebagai upaya dalam melindungi masyarakatnya dari

kompetisi antarpekerja dan perampasan sumber daya alam yang terjadi akibat datangnya imigran Tiongkok dalam jumlah besar akibat peristiwa demam emas pada awal tahun 1850-an (Elkin, 1945; Sydney Living Museum, n.d.).

#### 4.1.2 Konsepsi Australia terhadap Dirinya: Sebuah Negara Barat yang Berada di Dekat Asia

Australia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar keenam di dunia, namun merupakan negara kedua terakhir dalam tingkat kepadatan penduduk dengan populasi per kilometer persegi sebanyak tiga penduduk saja (Population Reference Bureau, 2012). Hal ini membentuk dilema strategis Australia, terutama terhadap cara melindungi diri dari ancaman dengan sumber daya yang terbatas. Akibatnya, kemampuan Australia untuk mempertahankan keamanannya selalu bergantung pada negara lain (Bisley, 2016).

Sebagai negara barat, sekutu dari Australia juga merupakan mereka yang memiliki identitas serupa dengannya, yaitu Amerika Serikat (AS) dan juga negara-negara Eropa. Identitas Australia sebagai negara barat diperkuat dengan pernyataan oleh John Howard, Perdana Menteri Australia ke-25, yaitu “kita tahu siapa kita, ... peradaban Eropa dan Barat yang memiliki hubungan kuat dengan Amerika Utara ...” (Philpott, 2010). Meskipun Australia merupakan negara barat, Australia lebih dekat dengan Asia secara geografis. Australia terpisah jauh dari sekutunya yang kerap menjadi benteng bagi keamanan nasionalnya. Ditambah, di dekat Australia terdapat sebuah tetangga besar yang tidak begitu ia kenal, yaitu Indonesia. Dengan begitu, Australia sadar bahwa ia ditempatkan di lingkungan asing yang membuahkan tantangan tersendiri baginya untuk bertahan hidup (Bisley, 2016). Pada kenyataannya, Australia sebenarnya tidak memiliki masalah pertahanan atau pun ancaman berarti. Keadaan Australia yang terisolasi dari sekutunya lah yang

menyebabkan ketakutan dan kecemasan mendalam terhadap ancaman luar yang belum tentu ada, yang tergambar secara jelas dalam identitas Australia (Philpott, 2010).

#### 4.1.3 Pertumbuhan Nilai “*Mateship*”

Nilai *mateship* merupakan “*modus vivendi*” dalam budaya Australia. Sebagian besar masyarakat dunia menganggap *mateship* sebagai praktik persahabatan. Kata *mateship* juga sering dihubungkan dengan nilai-nilai universal dan humanis seperti persaudaraan dan solidaritas (Dyrenfurth, 2015). Di Australia sendiri, kata *mateship* juga memiliki arti yang serupa. Secara umum, kata *mateship* merujuk pada loyalitas dan kesetaraan, serta perasaan solidaritas dan persaudaraan yang dimiliki warga Australia. *Mateship* juga merujuk pada sebuah gagasan untuk menghabiskan banyak waktu dan melakukan hal secara bersama-sama. Kata tersebut menekankan keberadaan komitmen bersama, kewajiban bersama, dan sikap saling mendukung dalam keadaan baik maupun keadaan buruk (Skiba & Folgado, 2006).

Secara historis, nilai *mateship* kerap dikaitkan dengan kaum laki-laki yang dianggap sebagai praktisi yang secara sadar menerapkan nilai tersebut dalam kesehariannya. Pada abad ke-19, sebagian besar laki-laki Australia bekerja sebagai penambang karena adanya demam emas di Australia. Para penambang tersebut dijuluki sebagai “*digger*”. Penggunaan kata *digger* ini kerap meluas dan menjadi sebutan bagi seluruh tentara Australia yang pergi ke Perang Dunia I di Prancis, terlepas dari pangkat yang mereka miliki. Keberadaan para *digger* tersebutlah yang memunculkan konsep atau nilai *mateship*, yang mana merujuk pada keadaan ketika orang-orang bekerja sama di lingkungan yang keras dan berbahaya, dan memberikan dukungan tanpa syarat terhadap satu sama lain (Skiba & Folgado, 2006).

Seiring dengan berjalannya waktu, nilai *mateship* juga mulai digunakan oleh kaum perempuan. Definisi *mateship* yang

dikeluarkan secara resmi oleh pemerintahan Australia juga menjadi semakin meluas, yaitu sebuah tradisi pemberian bantuan kepada orang lain secara sukarela, terutama mereka yang dalam kesulitan. Nilai tersebut juga telah menumbuhkan tradisi untuk selalu melayani orang lain dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang damai di tanah Australia. Kentalnya nilai *mateship* dalam masyarakat Australia telah membentuk konsepsi yang menonjol dalam cara orang Australia dalam melihat diri mereka sendiri (Crime Stoppers, 2020).

#### 4.2. Orientasi Kebijakan Luar Negeri Australia

Australia yang dipenuhi oleh ketakutan dan kegelisahan memengaruhi pembentukan kepentingan nasionalnya yang berfokus pada keamanan negaranya. Hal ini membawa Australia untuk mengambil tindakan yang selalu berpusat pada pencarian perlindungan dengan cara apa pun, salah satunya melalui kebijakan luar negerinya. Orientasi kebijakan luar negeri Australia tertuang secara komprehensif dalam Buku Putih Australia. Alexander John Gosse Downer, Menteri Luar Negeri Australia pada tahun 1996 hingga 2007, menganggap bahwa Buku Putih merupakan dokumen penting dan cetak biru untuk pelaksanaan kebijakan luar negeri dan perdagangan Australia (Brangwin, et.al., 2015).

Sejak merdeka hingga saat ini, Pemerintah Australia atau lebih khususnya Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia baru mengeluarkan empat Buku Putih tentang urusan luar negerinya, yaitu pada tahun 1997, 2003, 2012, dan 2017. Judul dari masing-masing Buku Putih tersebut adalah *In the National Interest*, *Advancing the National Interest*, *Australia in the Asian Century*, dan *2017 Foreign Policy White Paper*. Keempat Buku Putih tersebut memberikan arahan bagi kebijakan luar negeri Australia secara umum maupun secara spesifik untuk negara-negara tertentu, yaitu pada konteks ini adalah Indonesia

(Frühling, 2009).

Walaupun Buku Putih diproduksi lebih dari sekali dan selalu mengandung perubahan maupun penyesuaian sesuai dengan keadaan dunia internasional, Buku Putih negara selalu kembali berfokus pada kepentingan nasional sebuah negara. Terdapat beberapa kesamaan poin pembahasan dari keempat Buku Putih tersebut. Pertama, kepentingan keamanan Australia melampaui perlindungan fisik teritori Australia dan kerap menghubungkan keamanan negaranya dengan stabilitas. Australia melihat bahwa stabilitas negaranya dapat dipertahankan jika keamanan dan stabilitas kawasannya juga terjamin. Kepentingan strategis dan ekonomi Australia terletak di kawasan Asia Pasifik, sebuah wilayah yang meliputi Asia Tenggara, Asia Timur Laut, Pasifik, dan bagian timur Samudera Hindia (DFAT, 2017).

Kedua, dalam mempromosikan stabilitas dalam kawasan, Australia cenderung mengambil langkah yang berorientasi pada *engagement*. Meskipun Australia secara aktif membangun keterlibatan secara bilateral, regional, dan multilateral, Australia selalu menggarisbawahi pentingnya hubungan bilateral. Bahkan pada Buku Putih “*In the National Interest*” tertulis bahwa hubungan bilateral merupakan “*basic building block*” atau unit dasar pembangun seluruh hubungan maupun keterlibatan Australia di sistem internasional. Pembangunan hubungan secara bilateral dianggap sebagai tahapan pertama dalam membangun kepercayaan dan memperdalam hubungan Australia dengan mitra regionalnya. Walaupun demikian, hubungan bilateral bukanlah alternatif dari hubungan regional dan multilateral karena ketiga tingkatan hubungan tersebut saling mendukung dan melengkapi. Ketiga, Australia juga merupakan negara yang melihat pentingnya aset dalam mengejar kepentingan kebijakan luar negerinya (DFAT, 2003).

Keempat, Australia bersikap pragmatis dalam memilih hubungan,

masalah, dan kegiatan multilateral mana yang paling mungkin untuk memajukan kepentingan nasionalnya. Singkatnya, Australia selalu mencoba untuk terlibat dengan siapa yang dianggapnya penting, seperti Indonesia. Australia selalu menganggap Indonesia sebagai negara penting, seperti yang dikatakan Paul Keating, Perdana Menteri Australia ke-24, dalam pidatonya pada tahun 1994, yaitu “tidak ada negara yang lebih penting bagi Australia selain Indonesia.” Australia berpandangan bahwa jika hubungan Australia dengan Indonesia tidak dipelihara dan dikembangkan dengan benar, maka seluruh jaringan hubungan luar negeri Australia tidak lengkap. Pandangan ini selalu dinyatakan secara konsisten dalam Buku Putih dari tahun 1997 hingga 2017 (Department of the Prime Minister and Cabinet, 1994).

Menjalin hubungan yang baik dan dekat dengan Indonesia merupakan prioritas bagi Australia akan selalu penting secara fundamental. Hal ini dikarenakan lokasi strategis Indonesia di bagian utara Australia yang merupakan akses penting bagi 60% dari ekspor Australia dan ukuran Indonesia yang merupakan negara terbesar dan terpadat yang ada di dekat Australia. Ukuran dan lokasi geostrategis, ditambah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat telah menjamin peran kepemimpinan jangka panjang di Asia Tenggara serta peningkatan pengaruh global (Jones, 2011).

Australia melihat Indonesia sebagai pengaruh utama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kawasan. Oleh karena itu, Australia memiliki kepentingan nasional yang mendasar dalam stabilitas Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pandangan Australia bahwa pertumbuhan pengaruh ekonomi dan politik Indonesia kemungkinan besar akan memengaruhi dinamika keamanan kawasan. Dalam hal ini, instabilitas internal yang serius di Indonesia juga dapat mengganggu keamanan kawasan. Dengan demikian, membangun hubungan dalam berbagai sektor dengan Indonesia merupakan

kepentingan bagi Australia. Melalui program pengembangan, Australia mendukung upaya Indonesia dalam mengatasi ketimpangan dan menjaga stabilitas sosial (DFAT, 2017).

#### **4.3. Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA)**

Perdana Menteri Australia memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Melihat identitas dan orientasi kebijakan luar negeri Australia yang mengarah kepada *engagement*, maka salah satu kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Australia dalam bentuk *engagement* adalah memberikan program bantuan kepada tetangganya, Indonesia, dalam hal ketahanan pangan. Program tersebut secara resmi disebut sebagai Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA). Program tersebut merupakan bagian dari Australian Aid dan merupakan program jangka panjang yang dimulai pada tahun 2013 hingga 2023 (AIP-PRISMA, 2022).

AIP-PRISMA pertama kali dipublikasikan pada tanggal 21 November 2011 oleh Julia Gillard, Perdana Menteri Australia, sebagai hasil dari Australia-Indonesia Annual Leaders Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2011 di Nusa Dua, Bali. AIP-PRISMA merupakan program jangka panjang yang berfokus pada dua isu yang secara strategis penting untuk Indonesia dan Australia, yaitu membantu memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan meningkatkan taraf hidup petani maupun peternak miskin Indonesia. Kedua isu ini memiliki kaitan yang erat karena kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama kerawanan pangan. Tanpa adanya pendapatan yang cukup, seseorang tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan hariannya (Australia Embassy-Indonesia,

2011).

Oleh karena itu, seluruh program AIP-PRISMA diterapkan di kawasan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan tinggi karena merekalah yang paling rawan akan ketahanan pangan. Rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan Indonesia adalah 1,9. Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat yang merupakan tempat diimplementasikannya program AIP-PRISMA memiliki nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai indeks tersebut pada Indonesia secara keseluruhan, yaitu 2,27; 3,54; 4,2; 8,78; dan 7,86 secara berurutan (Badan Pusat Statistik, 2011).

Dalam mengatasi kemiskinan dan kerawanan pangan, fokus pendekatan yang diambil oleh AIP-PRISMA berada dalam sektor pertanian yang merupakan sumber pendapatan utama di kelima provinsi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase ketenagakerjaan pada sektor pertanian di kelima provinsi tersebut, yaitu 40% di Jawa Timur (2011), 47,13% di Nusa Tenggara Barat (2011), 64,9% di Nusa Tenggara Timur (2011), 70,21% di Papua (2011), dan 54% di Papua Barat (2010). AIP-PRISMA bertujuan untuk membentuk praktik pertanian yang lebih produktif dan meningkatkan akses pasar yang lebih baik untuk petani maupun peternak miskin. Dengan begitu, para petani dan peternak miskin tersebut dapat memperoleh kenaikan pendapatan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memperoleh maupun menghasilkan makanan (Badan Pusat Statistik, 2011).

Seperti yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, Australia merupakan negara yang melihat pentingnya aset dalam mengejar kepentingan kebijakan luar negerinya. Salah satu aset yang dimiliki oleh Australia adalah keahliannya dalam pertanian. Terlepas dari keadaan lingkungan yang kurang baik di Australia, seperti sering terjadinya kekeringan, Australia tetap dapat menghasilkan produk pertanian dalam

jumlah besar sepanjang tahun. Hal ini membuktikan Australia memiliki bahwa kemampuan yang baik dalam mengelola tantangan variabilitas iklim yang dramatis menunjukkan fleksibilitas dan ketahanan. Keahlian Australia tersebut juga terlihat dari fakta bahwa hampir 93% pasokan makanan Australia diproduksi secara domestik dan masih terdapat sisa sebanyak 60% produk pertanian yang ditujukan untuk pasar internasional. Berkat keahliannya dalam bidang pertanian, Australia berhasil mempertahankan peringkatnya dalam Global Food Security Index sebagai negara ke-14 dengan ketahanan terbaik di dunia (Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry, 2011).

Dalam hal ini, kecocokan akan keahlian Australia serta kebutuhan Indonesia menjadi dasar dari terbentuknya program AIP-PRISMA. Namun, terlepas dari kecocokan tersebut, pemilihan wilayah tempat diimplementasikannya program tersebut juga didorong oleh keinginan Australia dalam membangun interaksi ekonomi dan konektivitas yang lebih tinggi dengan kawasan Indonesia bagian timur yang terletak paling dekat dengan Australia Utara. Australia memang sering berinteraksi dengan Indonesia bagian timur. Darwin dan Kupang bahkan sejak dahulu telah mengembangkan hubungan bertetangga yang erat. Melalui kontak sosial, telah terbentuk sebuah ikatan di antara mereka (Charlton, 1991).

Kemudian, kecurigaan dan opini publik terkait pemborosan uang bantuan asing dan skala program bantuan Australia juga memainkan peran penting dalam menentukan wilayah implementasi. Walaupun keputusan pemberian bantuan luar negeri bukan merupakan wewenang masyarakat, akan tetapi sebagai negara demokratis liberal, pemerintah Australia tidak mungkin mengabaikan opini publik terhadap hal tersebut. Pasalnya sebuah negara demokratis melihat opini publik sebagai sebuah faktor sah yang harus dipertimbangkan dalam pengadopsian

kebijakan. Terlebih, sebuah kebijakan lebih cenderung berhasil jika didukung oleh opini publik. Dengan kondisi yang sudah saling mengenal, ditambah isu yang menjadi fokus dari program tersebut adalah ketahanan pangan dan kemiskinan, AIP-PRISMA menjadi lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat Australia. Perlu diingat kembali pula bahwa masyarakat Australia memiliki budaya *mateship*, yang mana merujuk pada kebiasaan mereka untuk saling membantu satu sama lain, sehingga keputusan tersebut lebih sejalan dengan apa yang menjadi keyakinan maupun kepentingan dari khalayak luas di Australia.

## 5. Kesimpulan

Sesuai dengan teori Konstruktivisme, interkasi sosial yang dijalani oleh Australia telah membentuk identitasnya yang dipenuhi oleh ketakutan dan kecemasan, serta nilai *mateship*. Australia juga kerap melihat keberadaan dirinya di tengah lingkungan

yang berbeda dan penuh tantangan. Identitas ini kemudian berkontribusi dalam pembentukan kepentingan nasionalnya yang menitikberatkan pada keamanan yang berfokus pada stabilitas. Untuk memperoleh hal tersebut, Australia selalu berupaya untuk mencari perlindungan, termasuk melalui kebijakan luar negerinya yang berpusat pada *engagement* dan penggunaan aset.

Salah satu bentuk *engagement* Australia ditujukan kepada Indonesia berupa pembentukan program bantuan dalam upaya penguatan ketahanan pangan Indonesia, yaitu AIP-PRISMA. Pembentukan program bantuan tersebut didorong oleh faktor kebutuhan Indonesia dan keahlian Australia dalam bidang pertanian, serta keberadaan opini publik Australia. Keberadaan program AIP-PRISMA yang berhasil menguatkan ketahanan pangan Indonesia tersebut kemudian membantu Australia dalam mengarahkan dan memenuhi kepentingan nasionalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- AIP-PRISMA. (2022). *Stories*. Diakses dari <https://aip-prisma.or.id/en/stories>
- Australian Embassy-Indonesia. (21 November 2011). *Australia and Indonesia work together to improve rural development*. Diakses dari [https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR11\\_086.html](https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR11_086.html)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN). *Pengembangan konsep indeks keamanan manusia Indonesia 2015*. Diakses dari [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4\)%20Kajian%20Tahun%202015/Indeks%20Keamanan/Final%20Laporan%20IKMI.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4)%20Kajian%20Tahun%202015/Indeks%20Keamanan/Final%20Laporan%20IKMI.pdf)
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2011). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2009/07/02/1489/html>
- Bisley, N. (2016). *Australia's strategic culture and Asia's changing regional order*. Diakses dari [https://www.nbr.org/wp-content/uploads/pdfs/publications/special\\_report\\_60\\_australias\\_strategic\\_culture\\_december2016.pdf](https://www.nbr.org/wp-content/uploads/pdfs/publications/special_report_60_australias_strategic_culture_december2016.pdf)
- Brangwin, N., Church, N., Dyer, S. & Watt, D. (2015). *Defending Australia: a history of Australia's defence white papers*. Diakses dari [https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/4024138/upload\\_binary/4024138.pdf;fileType=application/pdf](https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/4024138/upload_binary/4024138.pdf;fileType=application/pdf)
- Bultin, N.G. (1993). *Economics and The Dreamtime*. Melbourne, Australia: Cambridge University Press.
- Clay, E. (2002). *Food security: concepts and measurement*. Diakses dari <https://www.fao.org/3/y4671e/y4671e06.htm#:~:text=%E2%80%9CFood%20security%20%5Bis%5D%20a.an%20active%20and%20healthy%20life%E2%80%9D>
- Creswell, J.W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California, CA: SAGE Publications.
- Crime Stoppers. (2020). *Life In Australia: Australian Values and Principles*. Diakses dari <https://www.crimestopperswa.com.au/cswp/wpcontent/uploads/2020/06/Life-in-Australia-Australian-Values-andPrinciples.pdf>
- Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. (2011). *Australian food statistics 2010–11*. Canberra, Australia: Department of Agriculture, Fisheries and Forestry.
- Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). *Synthesis review of DFAT funded market systems development initiatives part I - main report*. Diakses dari <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/market-systems-development-synthesis-review-final.pdf>

- Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT). (2003). *Advancing the National Interest*. Diakses dari <https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2003-02/apo-nid74888.pdf>
- Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT). (2017). *2017 foreign policy White Paper*. Diakses dari <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/2017-foreign-policywhite-paper.pdf>
- Department of the Prime Minister and Cabinet. (1994). *Speech by the Prime Minister, the Hon P J Keating MP Australia today Indonesia 94 Overseas Passenger Terminal Sydney, Wednesday, 16 March 1994*. Diakses dari <https://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-9155>
- Dyrenfurth, N. (2015). *Mateship: a very Australian history*. Victoria, Australia: Scribe Publications.
- Elkin, A.P. (1945). Re-thinking the White Australia Policy. *The Australian Quarterly*, 17(3), 6-34. doi: <https://doi.org/10.2307/20631287>
- Frühling, S. (2015). *A history of Australian strategic policy since 1945*. Diakses dari <https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/264583/1/2009%20A%20History%20of%20Australian%20Strategic%20Policy%20%28DoD%29.pdf>
- Gomapper. (2023). *List of countries near Australia*. Diakses dari <http://www.gomapper.com/travel/list-of-countries-near/australia.html>
- Hamilton-Hart, N. (2019). Indonesia's Quest for Food Self-sufficiency: A New Agricultural Political Economy? *Journal of Contemporary Asia* 49(5), 734-758. doi: <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1617890>
- Haryono, W. (3 November 2017). *Hubungan Indonesia Australia fluktuatif bak roller coaster*. Diakses dari <https://www.medcom.id/internasional/asia/9K5RjEaN-hubunganindonesia-australia-fluktuatif-bak-roller-coaster>
- Human Security Unit. (2009). *Human Security in Theory and Practice: An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*. Diakses dari [https://www.academia.edu/30423057/HUMAN\\_SECURITY\\_IN\\_THEORY\\_AND\\_PRACTICE\\_An\\_Overview\\_of\\_the\\_Human\\_Security\\_Concept\\_and\\_the\\_United\\_Nations\\_Trust\\_Fund\\_for\\_Human\\_Security\\_Human\\_Security\\_Unit](https://www.academia.edu/30423057/HUMAN_SECURITY_IN_THEORY_AND_PRACTICE_An_Overview_of_the_Human_Security_Concept_and_the_United_Nations_Trust_Fund_for_Human_Security_Human_Security_Unit)
- Jalata, A. (2013). The Impacts of English Colonial Terrorism and Genocide on Indigenous/Black Australians. *SAGE Open* 3(3), 1-12. doi: <https://doi.org/10.1177/2158244013499143>

- Jones, B. (2011). *The slaughter of Australian cattle in Indonesia: an observation study*. Diakses dari [http://www.uat.rspca.org.au/sites/default/files/website/Campaigns/Live-export/Cattle-to-Indonesia/Live\\_exports-scientific\\_report.pdf](http://www.uat.rspca.org.au/sites/default/files/website/Campaigns/Live-export/Cattle-to-Indonesia/Live_exports-scientific_report.pdf)
- Kaesorry, M.D., Abdul, H., Mardiyono & Makmur, M. (2018). Policy Evaluation on Security Treaty (the Lombok Treaty) between Republic of Indonesia and Australia. *Russian Journal of Agricultural and Socio (RJOAS)*, 78(6), 19–32. doi: <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-06.02>
- Limenta, M.E & Candra, S. (2017). Indonesia Food Security Policy. *Indonesia Law Review*, 7(2), 245-65. doi: <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n2.198>
- Lorena, A. & Evershed, N. (4 Maret 2019). *The Killing Times the Massacres of Aboriginal People Australia Must Confront*. Diakses dari <https://www.theguardian.com/australia-news/2019/mar/04/thekilling-times-the-massacres-of-aboriginal-people-australia-must-confront>
- MacRae, G. & Reuter, T. (2020). Lumbung Nation: Metaphors of Food Security in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 48(142), 338-358. doi: <https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1830535>
- Moore, T. (2014). Aboriginal Agency and Marginalisation in Australian Society. *Social Inclusion* 2(3), 124-35. doi: <https://doi.org/10.17645/si.v2i3.38>
- Nabbs, G. (2020). Understanding Australia-Indonesia relations in the postauthoritarian era: resilience and respect. *Australian Journal of International Affairs*, 74(5), 532-556. doi: <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1725423>
- Neilson, J. & Wright, J. (2017). The State and Food Security Discourses of Indonesia: Feeding the Bangsa. *Geographical Research*, 55(2), 131-143. doi: <https://doi.org/10.1111/1745-5871.12210>
- Peter, C. (1991). Why NTT? Dalam Bellis, A., Barlow, C. & Andrews, K. (eds) *Nusa Tenggara Timur: The Challenges of Development*, 215-222. Canberra, Australia: Panther Publishing.
- Philpott, S. (2010). Fear of the Dark: Indonesia and the Australian National Imagination. *Australian Journal of International Affairs*, 55(3), 371-388. doi: <https://doi.org/10.1080/10357710120095225>
- Population Reference Bureau. (2012). *2012 World Population Data Sheet*. Diakses dari [https://www.prb.org/wp-content/uploads/2012/07/2012-population-datasheet\\_eng.pdf](https://www.prb.org/wp-content/uploads/2012/07/2012-population-datasheet_eng.pdf)
- Pristiandaru, D.L. (5 Februari 2022). *Daftar negara maju dan negara berkembang di dunia*. Diakses dari <https://internasional.kompas.com/read/2022/02/05/143000070/daftarnegara-maju-dan-negara-berkembang-di-dunia>

- Roberts, C.B., & Habir, A.D. (2015). Indonesia-Australia Relations: Progress, Challenges and Potential. Dalam Roberts, C.B., Habir, A.D., Sebastian, L.C. (eds) *Indonesia's Ascent. Critical Studies of the Asia Pacific Series*. London, UK: Palgrave Macmillan.  
[https://doi.org/10.1057/9781137397416\\_10](https://doi.org/10.1057/9781137397416_10)
- Rozaki, Z. (2021). Food Security Challenges and Opportunities in Indonesia Post COVID-19. Dalam Cohen, M.J. (ed) *Advances in Food Security and Sustainability*, 119-168. Cambridge, MA: Elsevier.
- SBS News. (9 Desember 2017). *Paul Keating's Redfern speech still powerful after 25 years*. Diakses dari  
<https://www.sbs.com.au/news/article/paul-keatings-redfern-speech-still-powerful-after-25-years/y4wrqipw6>
- Skiba, R. & Folgado, V.L. (2006). The idea of *mateship* in Australian culture: the sociolinguistic dimension of three speech acts. *Hikma*, 5, 201-219.  
[https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/18825/hikma\\_05\\_13.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/18825/hikma_05_13.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Penerbit Alfabeta.
- Sulaiman, A.A., Soetopo, D., Subagyono, K., Sulihanti, S. & Wulandari, S. (2018). *Kebijakan penyelamat swasembada pangan*. Jakarta, Indonesia: IAARD Press.
- Sydney Living Museums. *Chinese on the Goldfields*. Diakses dari:  
<https://sydneylivingmuseums.com.au/stories/chinese-goldfields>
- The Economist Group. (2022). *Global food security index 2022*. Diakses dari  
[https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/reports/Economist\\_Impact\\_GFSI\\_2022\\_Global\\_Report\\_Sep\\_2022.pdf](https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/reports/Economist_Impact_GFSI_2022_Global_Report_Sep_2022.pdf)
- Troath, S. (2019). Bonded but not embedded: Trust in Australia-Indonesia relations, Keating & Suharto to Turnbull & Jokowi. *Australian Journal of International Affairs*, 73(2), 126-142. doi: <https://doi.org/10.1080/10357718.2019.1583168>
- United Nations. (1994). *Human Development Report 1994*. New York, NY: Oxford University Press.
- Winarno, B. (2016). Neoliberal Policy of Indonesia's Agricultural Revitalization. *Jurnal Hubungan Internasional* 5(1), 31-39. doi: <https://doi.org/10.18196/hi.2016.0083.30-39>